

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada intinya berkaitan sebagai upaya yang berkelanjutan dari berbagai dimensi seperti sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Richo & Widhiasthini, 2022). Salah satu dari berbagai bentuk pembangunan adalah pembangunan daerah yang menjadi bagian pembangunan nasional yang muncul akibat penerapan otonomi daerah pasca reformasi. Otonomi daerah tersebut ditindak lanjuti dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah yang mencabut perundang-undangan 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah menjadi dasar hukum untuk pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya. Adanya prinsip otonomi daerah berdampak pada diberikannya wewenang bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan potensi yang dimiliki daerah, salah satunya potensi pariwisata yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia (Pranando, 2022).

Indonesia memiliki beragam sumber daya pariwisata seperti peninggalan historis, peninggalan masa purbakala, wisata alamiah dan wisata seni budaya, yang dapat menjadi sumber dan modal besar untuk upaya pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Pariwisata secara umum dipandang menjadi sektor yang bisa mendongkrak dan meningkatkan aktivitas pembangunan daerah, membuka lapangan kerja serta usaha baru, serta meningkatkan pendapatan asli

daerah apabila pariwisata tersebut dikelola dan dikembangkan dengan maksimal (Anhar & Usman, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan beberapa tujuan kepariwisataan sebagai cara dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, melestarikan lingkungan alam dan memajukan kebudayaan (Amrulloh et al., 2022). Adanya objek pariwisata juga bisa memberikan efek positif bagi suatu daerah dan masyarakat, karena fungsi lain dari pariwisata yakni pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Paradana & Hamrun, 2021).

Kontribusi positif yang diberikan dari sektor pariwisata tentunya perlu untuk dilakukan pengembangan kepariwisataan. Hal itu karena pengembangan sektor pariwisata dapat membawa perubahan ekonomi, sosial, dan budaya pada masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan pariwisata juga memiliki tujuan lain sebagai perbaikan, meningkatkan, dan memajukan pariwisata yang ada untuk dikembangkan menjadi destinasi yang berkualitas, seimbang, dan bertahap. (Lumbantobing et al., 2024). Dalam melakukan pengembangan dan pengelolaan pariwisata juga perlu dilakukan suatu sinergitas dan kolaborasi dari berbagai *stakeholder* untuk menemukan solusi atas kompleksitas isu dalam pengelolaan pariwisata yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu *stakeholder*. Oleh karena itu, kolaborasi dalam tata kelola pariwisata memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata (Aristy et al., 2021).

Konsep *collaborative governance* menjadi hal yang dibutuhkan dalam pengelolaan pariwisata di era saat ini. Hal tersebut dikarenakan komitmen dari pemerintah untuk tidak melakukan persaingan dengan swasta atau unsur *non-government organization* (NGO) tetapi lebih memilih upaya kolaboratif dengan meningkatkan kooperasi antar pemangku pihak pariwisata (Firdausi et al., 2023). Kotler dalam Saputri (2020) menyatakan destinasi wisata akan mendapati suatu keunggulan dalam bersaing jika masing-masing organisasi yang terlibat dapat berbagi sumber daya, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang mendukung proses pengembangan pariwisata (Dian Kagungan & Meutia, 2021).

Collaborative governance pada pengelolaan pariwisata menjadi upaya dalam menumbuhkan, mengembangkan, dan mempertahankan sektor wisata. Selain itu selaras dengan paradigma *governance* pada studi administrasi negara, menjadikan *collaborative governance* menjadi basis alternatif dalam berbagi tanggung jawab pengelolaan, sehingga *output* dan *outcome* kebijakan tidak lagi tersentral pada pemerintah melainkan menjadi tanggungjawab semua pemangku kepentingan (Fadlurrahman et al., 2022). Adanya keterlibatan dari *stakeholder* lain seperti swasta dan publik dalam pengelolaan pariwisata menjadikan pengelolaan pariwisata akan lebih berkembang dan menjadi objek yang dapat berdaya saing dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Rasyid & Darumurti, 2022).

Collaborative governance pada pengelolaan pariwisata juga pada saat ini telah berkembang menjadi model kolaborasi berbasis *pentahelix*. Model kolaborasi tersebut pertama kali dikembangkan oleh Menteri Pariwisata melalui

diterbitkannya Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Destinasi Wisata Berkelanjutan yang menekankan pentingnya dorongan sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, dan media massa. Sehingga tata kelola kolaborasi *pentahelix* sangat dibutuhkan dalam pelibatan secara bersama dalam mengembangkan obyek pariwisata semaksimal mungkin sehingga hal tersebut dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata yang lebih baik (Vani et al., 2020).

Penerapan *collaborative governance* pada pariwisata dengan efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang menderita berbagai masalah mengenai pengelolaan pariwisata (Keyim, 2016). Selain itu, penerapan tersebut dilakukan karena pariwisata merupakan industri yang terfragmentasi dengan berbagai pelaku yang sama-sama menyediakan layanan Pariwisata (Luongo et al., 2023). Sehingga, pengelolaan hubungan dengan *stakeholder* menjadi keharusan dalam proses kolaborasi untuk memastikan legitimasi dan penerimaan dalam *collaborative governance* pada pariwisata (Prevolšek et al., 2024). Salah satu daerah yang menerapkan *collaborative governance* pada pengelolaan pariwisata adalah Kabupaten Sukabumi.

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten di Jawa Barat mempunyai potensi keberagaman alam, hayati, dan budaya yang tinggi sehingga memiliki potensi wisata yang sangat beragam. Melalui Perda Sukabumi Nomor 11 Tahun 2016 mengenai penyelenggaraan kepariwisataan menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Sukabumi guna memberikan manfaat untuk keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan kesetaraan

secara proporsional (Apriliani et al., 2018). Penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Sukabumi sejak pandemi Covid-19 cenderung mengalami fluktuatif, hal ini dapat terlihat dari total wisatawan baik dari domestik atau mancanegara yang berwisata di Kabupaten Sukabumi menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Angka Wisatawan Kabupaten Sukabumi

No	Tahun	Wisatawan		Total
		Domestik	Mancanegara	
1	2020	1.419.724 orang	2.226 orang	1.421.950 orang
2	2021	1.439.634 orang	277 orang	1.439.911 orang
3	2022	6.624.640 orang	1.072 orang	6.625.712 orang
4	2023	4.346.019 orang	7.778 orang	4.353.797 orang
5	2024	2.083.737 orang	13.572 orang	2.097.309 orang

Sumber: (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)

Kepariwisataan menjadi salah satu bidang yang pada saat ini dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan salah satu potensi wisata yang menjadi fokus utama dikembangkan dan dikelola yaitu *Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu. *Geopark* atau taman bumi adalah kawasan geografi yang mempunyai warisan situs geologi serta kenampakan alam yang bernilai terkait aspek keanekaragaman geologis (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keanekaragaman budaya (*cultural diversity*). *Geopark* mempunyai prinsip pengelolaan kawasan bagi kepentingan konservasi, edukasi serta pembangunan perekonomian masyarakat secara berkesinambungan untuk menumbuhkan pemahaman serta kepedulian masyarakat bagi bumi dan lingkungan sekitarnya (Imelda et al., 2024). Ciletuh-Palabuhanratu menjadi kawasan *geopark* pertama dan

satu-satunya di Jawa Barat yang termasuk kedalam 10 kawasan *geopark* di Indonesia yang berstatus UNESCO *Global Geopark*.

Gambar 1. 1 Peta UNESCO Global Geopark



Sumber: Indonesiabaik.id

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) *Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu adalah kawasan *geopark* seluas 1.261 Km² yang berada di Kabupaten Sukabumi yang telah menjadi bagian dari *Global Geopark Network (GGN)* pada 2018. Kawasan UGG Ciletuh-Palabuhanratu memiliki semboyan memuliakan bumi mensejahterakan masyarakat, menjadi fokus utama pengelolaan dan pengembangan *geopark*. Sebagai fokus pengembangan dan pengelolaan *geopark* berbasis tata kelola kolaborasi, Pemerintah Kabupaten

Sukabumi perlu melakukan penguatan rencana pengembangan dan pengelolaan melalui dasar hukum yang jelas salah satunya melalui peraturan-peraturan daerah.

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 25 tahun 2021 mengenai *masterplan UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Tahun 2020-2029* menjadi upaya pemerintah daerah mengembangkan kawasan *geopark*. Tujuan adanya rencana pengembangan tersebut sebagai strategi upaya mewujudkan pengembangan *geopark* yang terarah, sinergis, dan berkesinambungan dengan mengelaborasi nilai perlindungan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi setempat demi percepatan pembangunan daerah dengan memadukan konsep kolaborasi dalam pelaksanaannya. Sebagai hasil dari pengembangan rencana induk dan upaya pengelolaan kawasan UGG Ciletuh-Palabuhanratu dapat terlihat dari peningkatan total wisatawan yang berkunjung ke kawasan *geopark* dengan pengecualian pada tahun 2020 dan 2021 ketika kondisi pandemi covid.

Tabel 1. 2 Kunjungan UGG Ciletuh-Palabuhanratu

No	Tahun	Total Pengunjung Geopark	Rata-Rata Perbulan
1	2020	347.261 orang	28.938 orang
2	2021	321.420 orang	26.785 orang
3	2022	1.194.161 orang	99.513 orang
4	2023	1.265.468 orang	105.455 orang

Sumber: *Geopark Global Network*, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

. Berdasarkan data di atas jumlah kunjungan ke *geopark* cenderung meningkat setiap tahunnya, tetapi terdapat perlambatan jumlah pengunjung antara tahun 2022-2023 jika dibandingkan dengan 2021-2022. Tentunya hal tersebut menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pariwisata dan Badan Pengelola *Geopark* dalam meningkatkan secara signifikan jumlah

pengunjung ke berbagai *geosite* yang berada di kawasan UGG Ciletuh-Palabuhanratu, di karenakan adanya kawasan *geopark* dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan peluang usaha tingkat lokal dengan dibarengi kesadaran untuk menjaga kelangsungan hidup obyek wisata yang ada dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan konservasi lingkungan (Pujiyono, 2022). Salah satu *geosite* yang ada di Ciletuh-Palabuhanratu yang menjadi fokus pada riset ini yaitu *geosite Geyser Cisolok* yang berada di geoarea utara (Geoarea Cisolok) Ciletuh-Palabuhanratu.

Geosite Geyser Cisolok merupakan kawasan air panas berupa *geyser* yang menjadi bukti keberadaan pergeseran jalur magmatik di kawasan *geopark* khususnya dibagian wilayah utara. *Geyser Cisolok* menjadi *geosite* yang dikelola secara langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi dan Badan Pengelola *Geopark Ciletuh-Palabuharantu*. *Geyser Cisolok* menjadi *geosite* yang memiliki keunikan di UGG Ciletuh-Palabuhanratu karena merupakan satu-satunya *geyser* yang ada di Indonesia dan terus mengeluarkan air selama 24 jam *non-stop* sehingga hal tersebut menjadikan *geosite geyser* menjadi perhatian pengembangan dan pengelolaan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hasil pengamatan di kawasan *geyser* masih terdapat beberapa permasalahan dalam hal pengelolaan *geyser* mulai dari aksesibilitas ke lokasi *geyser*, penataan kawasan pedagang yang belum rapi, fasilitas umum *geyser* yang belum memenuhi standar, belum terkonsentrasinya kawasan parkir, kesadaran warga lokal akan kenyamanan pengunjung cenderung rendah, tarif retribusi yang tidak sesuai dengan layanan yang diberikan, menjadikan tantangan tersendiri bagi

pengelolaan *geosite* tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil ulasan di internet tentang kawasan *Geyser Cisolok* juga cenderung sejalan dengan hasil pengamatan, di mana para pengunjung mengeluhkan akses jalan menuju *geyser* dan mengeluhkan kualitas fasilitas umum yang ada di *Geyser Cisolok* dan masih banyak pelaku usaha di kawasan yang masih belum tertib menjaga tata tempat *geyser*. Selain itu, penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geyser Cisolok* masih belum banyak ditemukan di beberapa penelitian ilmiah.

Oleh karena belum banyak ditemukannya pembahasan mengenai hal tersebut, diharapkan suatu kolaborasi yang dilakukan antar berbagai *stakeholder* di kawasan *Geyser Cisolok* baik itu dari pemerintah daerah selaku pengelola, swasta, publik, dan pers untuk melakukan pembenahan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap kawasan *geyser*, sehingga potensi *geyser* yang dikelola dapat dimaksimalkan sehingga meningkatkan daya tarik wisata ke UGG Ciletuh-Palabuhanratu khususnya di *geosite Geyser Cisolok*. Sehingga dari permasalahan yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik dalam melakukan riset lebih mendalam dengan judul “***Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Geyser Cisolok Di UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu***”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang disampaikan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan riset sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pariwisata *Geyser* Cisolok di *UNESCO Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu?
2. Bagaimana *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geyser* Cisolok di *UNESCO Global Geopark* Ciletuh Palabuhanratu?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geyser* Cisolok di *UNESCO Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka pada penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengelolaan pariwisata *Geyser* Cisolok di *UNESCO Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu.
2. Menganalisis *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geyser* Cisolok di *UNESCO Global Geopark* Ciletuh Palabuhanratu.
3. Menganalisis partisipasi masyarakat mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geyser* Cisolok di *UNESCO Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu.

1.4. Signifikansi Penelitian

1.4.1. Signifikansi Akademik

Berbagai riset terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata sudah banyak dilakukan penelitian khususnya dari segi desa wisata, dan *geopark* secara umum. Tetapi peneliti belum menemukan penelitian yang fokus membahas

collaborative governance dalam pengelolaan *geosite* secara khusus pada pariwisata berkonsep *geopark*, serta penelitian yang membahas mengenai pengelolaan *geyser* hampir tidak ada yang meneliti. Sehingga penelitian ini berfokus kepada *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geyser Cisolok* di *UNESCO Global Geopark Ciletuh-Palabuhanratu*. Penelitian ini menggunakan referensi 10 penelitian terdahulu.

Rujukan pertama, riset yang dilakukan oleh Dina Gustia Ningsih, Roni Ekha Putera, dan Yoserizal pada tahun 2023 dengan judul "*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung*". Riset tersebut bertujuan menganalisis kolaborasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang terdiri dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda Sijunjung dengan LPPM Unand, BCA, serta Pokdarwis Nagari Silokek agar pariwisata *Geo park* Silokek dikenal oleh wisatawan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan perolehan informan dengan *purposive sampling* serta dilakukan triangulasi data.

Hasil riset menunjukkan kolaborasi pengelolaan *Geo park Silokek* berjalan cukup baik. dengan terbinanya kelompok sadar wisata dan bertambahnya jumlah wisatawan dan kawasan *Geo park Silokek* menerima penghargaan di tingkat nasional. Namun, pada pelaksanaannya masih ada hambatan pada ketidakseimbangan sumber daya sehingga masih perlu adanya kolaborasi dan

belum terlalu fokus dengan regulasi yang jelas untuk mengatur jalannya kolaborasi pengelolaan *geopark* (Ningsih et al., 2023).

Relevansi rujukan riset ini dengan riset yang akan dikaji yaitu terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *geo park* yang dianalisa oleh penelitian tersebut. Rujukan ini membantu memberikan gambaran tentang proses dan implementasi *collaborative governance* yang sudah dijalankan dalam pengelolaan pariwisata *geopark*.

Rujukan kedua, artikel yang ditulis oleh Karina Widya Aristy, Candradewini, dan R. Ahmad Buchari pada tahun 2022 berjudul "Proses Kolaboratif Dalam Pengembangan *Geopark* Pongkor Sebagai Kawasan Pariwisata Di Kabupaten Bogor". Riset tersebut bertujuan menganalisis proses kolaboratif dalam pengembangan *Geopark* Pongkor. Metode riset yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik perolehan data melalui observasi, dokumen, dan wawancara serta dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Hasil riset menunjukkan proses kolaboratif dalam pengembangan *Geopark* Pongkor yang terjalin antara *stakeholder* pemerintah, akademisi, bisnis dan masyarakat belum optimal. Hal tersebut disebabkan belum sinergisnya kolaborasi antar *stakeholder*, di mana para *stakeholder* belum menjalankan perannya sesuai tupoksi dan kemampuannya, dan belum mengindahkan aspek-aspek penting dalam pelaksanaan proses kolaboratif serta komunikasi yang belum dilakukan dengan intens dan melibatkan seluruh *stakeholder* secara aktif berpengaruh pada kurangnya kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama, sehingga hasil nyata pada proses kolaborasi pengembangan *Geopark* Pongkor sulit diperoleh (Aristy et al., 2021).

Rujukan memiliki relevansi dengan riset yang diteliti berkaitan *collaborative governance* dalam pariwisata *geopark* dengan merujuk teori Ansell dan Gash. Rujukan ini membantu dalam memberikan gambaran proses *collaborative governance* dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata *geopark*.

Rujukan ketiga, riset yang dilakukan oleh Satoshi Ishida dari *University of Nagasaki* Jepang pada tahun 2021 berjudul "*An Assessment of Collaborative Governance In Networking For Contents Tourism*". Riset ini bertujuan menilai peran pemangku kepentingan utama dalam memformat *networking* dalam konteks *contents tourism*. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, dan pengambilan data melalui data sekunder dan *interview* dengan *stakeholder Sasebo Project Team for Regional Revitalization (SPTR2)*.

Hasil riset menunjukkan adanya sejumlah asosiasi, federasi, dan jaringan di sektor pariwisata di Sasebo yang bersedia berpartisipasi aktif menjadi bagian afiliasi, meskipun tantangan utama dalam promosi wisata perlu ada pergerasan paradigma dari “saya” ke “kita”. Selain itu, kualitas *networking collaborative governance* dan hasilnya bergantung kepada kualitas wacana dan pengambilan keputusan antara peserta *networking*. Serta, *contents tourism* di Sasebo merupakan gerakan pariwisata baru meskipun ada banyak kegiatan yang sudah dikenal masyarakat, sehingga terlalu dini untuk mengevaluasi SPTR2 menjadi jaringan kolaboratif yang efektif sehingga masing banyak cacatan untuk menurut *collaborative governance* yang efektif (Ishida, 2021).

Relevansi penelitian ini dengan riset yang sedang diteliti yakni sama-sama membahas *collaborative governance* dalam pariwisata. Namun pada artikel riset

yang dirujuk menggunakan dua teori dari Bryson dan Ansell & Gash dalam menilai *networking collaborative governance*-nya sehingga memperkaya perspektif teori pada pembahasan yang akan diteliti.

Rujukan keempat, senior tesis yang ditulis oleh Rachel E. Killen dari *University of South Carolina-Columbia* Amerika Serikat pada tahun 2023 dengan judul "*Balancing Conservation dan Enjoyment: A Case Study of Sustainable Tourism in Yellowstone National Park*". Riset ini bertujuan mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan pariwisata berkelanjutan di taman dan mengusulkan perbaikan yang efektif untuk mempertahankan karakter ekowisata Yellowstone melalui kolaborasi antara *National Park Service* (NPS) dengan perhotelan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method dengan kualitatif *interview* semi terstruktur dan kuantitatif survey.

Hasil riset menunjukkan, berdasarkan survey kuesioner dan wawancara semi-terstruktur dengan manajer perhotelan di Yellowstone mengungkapkan keberhasilan kolaborasi antara perhotelan dan NPS yang menghasilkan integrasi berbagai perspektif dan pemenuhan dua mandate dari *US National Park* yakni 1) melestarikan pemandangan, objek alam dan sejarah, serta kehidupan satwa liar. 2) menyediakan kenikmatan yang sama atas dengan cara tersebut dan dengan cara dan sarana yang tidak akan merusaknya demi kenikmatan generasi mendatang. Selain itu, keberhasilan kolaborasi ini meninggalkan dampak positif dalam menekankan pentingnya pariwisata berkelanjutan (Killen, 2023).

Relevansi rujukan ini dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama membahas kolaborasi dalam pariwisata. Namun, pada penelitian rujukan

menggunakan teori kolaborasi Jamal dan Stronza (2009) dan hanya melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta, sedangkan peneliti akan merujuk kepada teori Ansell dan Gash dengan model *pentahelix*.

Rujukan kelima, artikel jurnal dari Fadlurrahman, Ari Mukti, Yuni Kurniasih, dan Rizza Arge Winanta pada tahun 2022 berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata di Desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses *collaborative governance* serta hambatan yang menyertainya. Metodologi yang digunakan riset ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik sampel yang dipilih secara *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui *forum group discussion*, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil riset menunjukkan bahwa tidak optimalnya *collaborative governance* dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Desa Ngargogondo karena *networked structure stakeholder* yang tidak terorganisir dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Di mana masing-masing *stakeholders* telah memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksinya, tetapi belum memiliki kesatuan visi dan cita-cita menuju terbangunnya sebuah desa wisata. Selain itu, adanya kekhawatiran tumpang tindih antara atas lahan bisnis wisata karena pembagian kerja yang tidak jelas menjadikan kondisi *networked structure* yang belum terkoordinir sehingga belum optimalnya *collaborative governance* dan menjadi hambatan dalam percepatan pembentukan desa wisata di Ngargogondo (Fadlurrahman et al., 2022).

Relevansi referensi penelitian ini dengan riset yang sedang diteliti yakni terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata yang dikaji oleh

riset tersebut. Referensi ini membantu dalam mendapatkan gambaran tentang proses *collaborative governance* dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Rujukan keenam, artikel riset dari Bernhard Fabian Bichler dan Magdalena Losch dari *University of Innsbruck Austria* pada tahun 2019 berjudul "*Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights into a Community-Oriented Destination*". Riset ini bertujuan mengungkap proses yang mendorong kolaborasi pariwisata antara pemangku kepentingan. Metode yang dipakai riset ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus.

Hasil riset menunjukkan kepemimpinan menjadi pendorong penting dalam *collaborative governance*, akan tetapi ada beberapa hambatan yang muncul *collaborative governance* pada riset ini yaitu temuan bahwa transformasi kelembagaan menyebabkan kurangnya kepercayaan dan meningkatnya rasa tidak aman. Keterlibatan aktor seperti masyarakat pada pengambilan keputusan dan implementasi masih sangat kurang. Pemahaman bersama tentang arah pembangunan masa depan tidak ada diantara *stakeholder*. Sehingga, menargetkan implikasi peran kepemimpinan untuk mendorong pengembangan pemahaman bersama dan memulai proses pembelajaran kolaboratif yang memberikan hasil yang terlihat dan nyata pada masa yang penuh gejolak (Bichler & Lösch, 2019).

Penelitian ini memiliki kaitan dengan riset yang akan diteliti yakni sama-sama membahas mengenai *collaborative governance* dengan menggunakan teori Ansell dan Gash. Namun, penelitian ini lebih berfokus kepada destinasi pariwisata berorientasi komunitas, sedangkan peneliti akan berfokus pada model *pentahelix* dalam melihat model *collaborative governance*-nya.

Rujukan ketujuh, jurnal yang ditulis Firman Firdausi, Rifky Aldila Primasworo, dan Adil Abdillahtahun 2023 berjudul “*Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Probolinggo*”. Penelitian tersebut bertujuan dalam menganalisis *collaborative governance* pada pengelolaan pariwisata di Probolinggo. Metode yang dipakai yakni model kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan ada tiga *stakeholder* yang berkolaborasi mengelola pariwisata di Kabupaten Probolinggo yakni pemerintah/organisasi perangkat daerah melalui UPT, swasta melalui perusahaan daerah dan badan hukum swasta, serta masyarakat. Dalam hal regulasi pengelolaan, *collaborative governance* pada pengelolaan pariwisata di Probolinggo masih didominasi berdasarkan peraturan pemerintah, dan peraturan daerah hanya sebatas menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataannya. Selain itu kolaborasi yang dijalankan juga masih bersifat *triplehelix* dengan belum adanya keterlibatan dari akademisi maupun swasta dalam mengembangkan destinasi pariwisatanya. (Firdausi et al., 2023).

Rujukan ini mempunyai relevansi dengan riset yang akan diteliti menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash pada pengelolaan pariwisata. Referensi riset tersebut juga menjadi gambaran untuk melihat perubahan bentuk paradigma pelayanan wisata dari *old public administration* ke konsep kolaborasi.

Rujukan kedelapan, riset yang dilakukan oleh Bambang Pujiono tahun 2022 berjudul “Kolaborasi Multi Aktor Dalam Pengelolaan Wisata *Geo Park* Belitung”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi multi-aktor dalam

mengelola pariwisata *Geo Park* Belitung. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pemilihan informan berdasarkan konsep *mapping stakeholders*.

Hasil riset memberikan realitas keberhasilan pengelolaan wisata *Geo Park* Belitung yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan terjalinnya kerjasama antar lembaga dalam rangka pengelolaan pariwisata *Geo Park* Belitung dengan melibatkan pemerintah, swasta, dan komunitas dalam integrasi peran pembangunan geowisata Belitung. Sehingga meskipun secara kapasitas organisasi berbeda, dan memiliki peran dan otoritas masing-masing tetapi karena adanya satu visi dan misi yang selaras dalam mewujudkan *Geo Park* Belitung yang mendunia menjadikan para aktor berhasil menjalin kolaborasi sehingga *Geo Park* berhasil diakui oleh UNESCO sebagai aset internasional. Penelitian ini memiliki relevansi dengan riset yang diteliti karena membahas mengenai konsep *collaborative governance* pada pengelolaan *geopark*. Rujukan tersebut juga menjadi gambaran untuk melakukan perbandingan dalam pengelolaan *geopark* melalui konsep kolaborasi (Pujiyono, 2022).

Rujukan kesembilan, artikel dari Matthoriq, Soesilo Zauhar, dan Romy Hermawan tahun 2021 berjudul "*Collaborative Governance* Dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa Bumiaji *Agrotourism* di Kota Wisata Batu". Riset ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola pariwisata desa, khususnya di Kawasan Wisata "Bumiaji *Agrotourism*" di Kota Wisata Batu dalam perspektif *collaborative governance*. Metode riset yang digunakan adalah kualitatif deskriptif.

Kajian riset menunjukkan temuan bahwa keterlibatan *stakeholder* dalam kolaborasi tata kelola pariwisata Desa Bumiaji belum optimal, meskipun secara

prinsip *good tourism governance* sudah meningkat pada aspek kuantitas aktor yang melibatkan diri di dalam wisata. Selain itu, belum meratanya kualitas kolaborasi pada tata kelola pariwisata desa di Bumiaji yang disebabkan karena lemahnya penguatan pembangunan kepercayaan antar para *stakeholders* pariwisata yang terlibat dalam proses kolaborasi menjadikan tantangan yang berlu dibentuk dalam mengakomodir kepentingan *stakeholder* pariwisata baik secara langsung ataupun tidak langsung (Matthoriq et al., 2021).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang akan diteliti karena mengadopsi variabel *collaborative governance* dan menyinggung tata kelola pariwisata antar *stakeholders* yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti.

Rujukan kesepuluh, adalah riset yang dilakukan oleh Parhad Keyim dari *University of Eastern-Finland Finlandia* pada tahun 2017 berjudul "*Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonismahti*". Riset ini bertujuan mengeksplorasi pariwisata sebagai mekanisme pembangunan sosial ekonomi di Vuonismahti, mengeksplorasi kontribusi sosial ekonomi pariwisata terhadap desa dan mengeksplorasi kegiatan kolaboratif pariwisata yang dilakukan didalam serta diluar lingkungan sosial ekonomi dan kelembagaan desa. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik wawancara semi terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan masyarakat desa menerima manfaat pariwisata yang terbatas karena berbagai kendala yang berakar pada pengaturan sosial ekonomi dan kelembagaan desa sekitarnya. Namun, perjuangan untuk merumuskan pendetakaan *tourism collaborative governance* (TCG) yang adil dan efektif yang

dapat membawa manfaat sosial ekonomi bagi desa dan komunitas pedesaan lainnya yang menurun di Finlandia, sehingga TCG cukup efektif di jalankan melalui aktor negara dan *non-negara* (Keyim, 2018).

Rujukan penelitian diatas memiliki relevansi dengan topik yang diteliti karena membahas *collabotive governance* dalam pariwisata. Namun, riset ini merujuk kepada teori *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh serta *stakeholder* yang terlibat masih bersifat *triplehelix*. Sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih merujuk kepada teori dari Ansell dan Gash dengan model *pentahelix*.

Berdasarkan rujukan riset sebelumnya, lebih banyak membahas mengenai *collaborative governance* pada pengelolaan dan pengembangan *geopark* secara umum. Kemudian pada beberapa riset lebih membahas mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata yang menjadi potensi wisata daerahnya untuk dikembangkan dengan melibatkan tiga aktor kolaborasi. Penelitian yang membahas *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata dengan fokus pada desa wisata. Beberapa penelitian internasional mengenai *collaborative governance* pada pariwisata di negaranya dengan menggunakan teori *collaborative governance* yang berbeda dan fokus objek dan metode yang berbeda.

Penelitian ini berbeda dengan riset-riset yang sudah ada, di mana *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *geopark* tidak berfokus pada satu *geosite* pariwisata yang khas melainkan kumpulan *geosite* secara umum. Sedangkan riset yang akan diteliti lebih berfokus pada *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata di satu *geosite* pariwisata UNESCO *Global Geopark*

Ciletuh-Palabuhanratu yakni *Geyser* Cisolok, karena objek *geyser* merupakan satu-satunya objek penelitian yang hanya ada satu dari 10 *geopark* yang berstatus *global* dan tidak ada yang membahas tentang *collaborative governance* dalam pengelolaannya secara khusus. Selain itu riset ini merujuk jurnal internasional untuk melihat perbandingan pada kajian teori, metode dan fokus dari riset internasional untuk melihat *gap research* dalam pengelolaan pariwisata berdasarkan kajian teori.

Secara akademis, kajian dari hasil riset ini diharapkan bisa memberikan signifikansi bagi berbagai riset dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya pada proses, penerapan, dan evaluasi *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *geyser* atau *geosite* lain yang memiliki keunikan tersendiri pada kawasan *geopark* lain baik berstatus UNESCO *Global Geopark* atau *Geopark* Nasional.

1.4.2. Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi penulis

Hasil pada riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi peneliti dalam meningkatkan pengalaman mendalam terkait *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata *Geyser* Cisolok di UNESCO *Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu.

2. Manfaat bagi pemerintah

Riset ini diharapkan bisa menjadi acuan, pertimbangan, dan referensi untuk *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan *Geyser* Cisolok untuk meningkatkan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata *geyser* yang menjadi salah satu *geosite* unik yang hanya dimiliki oleh UGG Ciletuh-Palabuhanratu,

sehingga menjadikan pariwisata *Geyser* Cisolok berkualitas internasional dan berdampak pada berjalannya konsep pembangunan berkelanjutan dari konsep *geopark*.

3. Manfaat bagi masyarakat

Kajian dari hasil riset ini diharapkan bisa menjadi dorongan dan motivasi untuk masyarakat umum agar selalu terlibat aktif dalam berkolaborasi melakukan pengelolaan *Geyser* Cisolok, sehingga terjalinnya suatu kolaborasi yang efektif antar *stakeholders* dan pada akhirnya berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar *Geyser* Cisolok.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada bagian sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran terstruktur dari penjelasan dan pembahasan penulis supaya memudahkan dalam penulisan laporan penelitian tentang *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pariwisata *Geyser* Cisolok Di UNESCO *Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu, maka peneliti menulis sistematika dalam lima bab, seperti dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian awal bab ini membahas seputar deskripsi umum mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji pada penelitian. Dalam bab pendahuluan terdiri atas lima bahasan bab, yaitu: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri atas signifikansi akademis serta signifikansi praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Bagian ini menjelaskan mengenai kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian yang memiliki kaitan dengan *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pariwisata *Geyser* Cisolok Di UNESCO *Global Geopark* Ciletuh-Palabuhanratu berupa teori mengenai *collaborative governance*, pengelolaan, pariwisata, pengelolaan pariwisata, UNESCO *Global Geopark*, persepsi, dan *stakeholder*. Pada bagian ini peneliti menguraikan kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian metodologi penelitian membahas tentang metodologi yang akan dipakai dalam riset yang terdiri atas paradigma penelitian yang digunakan, jenis metode, desain riset, teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria*, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini menguraikan tentang deskripsi umum obyek dari riset yang akan dilaksanakan, hasil riset yang sesuai dengan rumusan masalah, dan pembahasan hasil riset untuk dibandingkan dengan penelitian yang menjadi rujukan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bagian ini berisikan mengenai simpulan atas seluruh hasil riset yang telah dilaksanakan, serta memberikan rekomendasi riset baik secara akademis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisikan mengenai sumber dan jenis-jenis referensi yang digunakan dalam penelitian baik melalui judul buku, artikel jurnal ilmiah, *website*, serta produk hukum yang digunakan sebagai bahan rujukan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN